



BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi E-Purchasing Metode
Negosiasi & Mini Kompetisi"

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Surat Edaran
LKPP Nomor 1 Tahun 2025.

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

TAHUN 2025

LAPORAN
BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
“IMPLEMENTASI E-PURCHASING METODE NEGOSIASI & MINI KOMPETISI
SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025 DAN SURAT EDARAN
LKPP NOMOR 1 TAHUN 2025”



BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan tema “Implementasi E-Purchasing Metode Negosiasi & Mini Kompetisi Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025.” pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 telah selesai disusun.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Surat Edaran Bersama Nomor 000.4.1/648/SJ Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik versi-6 pada Pemerintah Daerah dan Surat Edaran LKPP Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6, dimana mulai tanggal 1 Januari 2025 LKPP sudah mulai mengimplementasikan Katalog Elektronik Versi 6 serta melakukan penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 secara bertahap. Katalog Elektronik Versi 6, atau yang disebut “Katalog Elektronik”, adalah suatu bagian dari ekosistem Platform Pengadaan Nasional yang dimiliki oleh LKPP dan dikelola bersama Telkom yang memiliki fungsi sebagai platform yang digunakan oleh Kementerian, Lembaga setingkat Kementerian, dan/atau serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD melalui metode E-Purchasing. Dengan tersusunnya Laporan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis E-Purchasing melalui Katalog Elektronik Versi 6 LKPP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, diharapkan dapat mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di Kabupaten Purbalingga serta mewujudkan tujuan pengadanan yaitu *value for money*.

Kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan “Implementasi E-Purchasing Metode Negosiasi & Mini Kompetisi Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025.” Kami ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan motivasi bagi peningkatan kualitas pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 7 Agustus 2025

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA



DRAJAT UJI WAKHYONO, ST., MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 19711111 199803 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR..... ii

A. PENDAHULUAN..... 1

1. Latar Belakang 1

2. Tujuan 3

B. METODOLOGI PELAKSANAAN 3

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan..... 3

2. Penyelenggara dan Peserta Sosialisasi 3

3. Metode Pelaksanaan..... 4

4. Rundown Kegiatan 4

C. HASIL PELAKSANAAN SOSIALISASI 5

D. PENUTUP..... 10

LAMPIRAN I Salinan Daftar Hadir 11

LAMPIRAN II Surat Undangan 15

LAMPIRAN III Dokumentasi Kegiatan 17

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Instruksi Bupati Purbalingga Nomor 027/2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui E-Purchasing di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga mengintruksikan untuk merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri, serta untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan menetapkan nilai transaksi *E-Purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik.

Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 000.4.1/648/SJ Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 mengamanatkan bahwa dalam rangka mendorong transparansi, akuntabilitas dan percepatan pelaksanaan barang/jasa melalui Katalog Versi 6 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi agar segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui Katalog Versi 6 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Katalog Elektronik Versi 6 yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP dan dirancang untuk mempermudah proses pengaraan seperti kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan, dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, serta kemudahan *e-audit* dan monitoring secara *real time* proses transaksi yang sedang berjalan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan, sekaligus mempercepat proses pengadaan barang/jasa.

Adanya penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan tema “Implementasi

& Praktek E-Purchasing pada Katalog V.6.”, sangat bermanfaat bagi personil pengadaan sehingga Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara, serta Pejabat Pengadaan segera melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik versi 6 LKPP di Kabupaten Purbalingga dengan lancar, memenuhi prinsip pengadaan serta mewujudkan proses pengadaan barang.jasa yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di Kabupaten Purbalingga sehingga tercapai tujuan pengadaan yaitu *value for money*. Berkaitan dengan hal tersebut Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan tema “Implementasi E-Purchasing Metode Negosiasi & Mini Kompetisi Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025.” penting untuk diselenggarakan di Kabupaten Purbalingga.

2. Tujuan

Tujuan dilakukan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan tema “Implementasi E-Purchasing Metode Negosiasi & Mini Kompetisi Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025.” antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengguna dalam memanfaatkan sistem pengadaan barang/jasa yang lebih efisien dan transparan.
- b. Mewujudkan prinsip pengadaan serta mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di Kabupaten Purbalingga sehingga tercapai tujuan pengadaan yaitu *value for money*;
- c. Mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan transparan serta komitmen mendukung penggunaan produk - produk dalam negeri dengan belanja *e-Purchasing* melalui Katalog Elektronik Versi 6 LKPP;
- d. Meningkatkan pemahaman PA/KPA/PPKom/Pejabat Pengadaan/Penyedia terhadap mekanisme dan tata cara belanja melalui *e-Purchasing* melalui Katalog Elektronik Versi 6 LKPP dengan metode negosiasi dan mini kompetisi.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan tema “Implementasi E-Purchasing Metode Negosiasi & Mini Kompetisi Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025.” Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 dimulai pukul 08.00 WIB s.d selesai. Adapun tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan “Implementasi E-Purchasing Metode Negosiasi & Mini Kompetisi Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025.” di unit kerja masing-masing peserta.

2. Penyelenggara dan Peserta Sosialisasi

Penyelenggara adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peserta yang hadir adalah seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengadaan (PP)/ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada OPD/ Unit Kerja OPD di Kabupaten Purbalingga.

3. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan tema “Implementasi & Praktek E-Purchasing pada Katalog V.6.” dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting* <https://us02web.zoom.us/j/2783465879?pwd=TmbbzfOKW48ng8vBB0DPvQx5A0W5ti1&omn=81582060085> ID Rapat: 278 346 5879 Kode Sandi: PPLC2025

4. Rundown Kegiatan

No	JUDUL BIMTEK	NARASUMBER	DurasiPelaksanaan
	<p>Implementasi & Praktek ePurchasing Pada Katalog Elektronik V.6</p> <p>(Metode Negosiasi & Mini Kompetisi)</p> <p>Pokok – pokok materi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan & Implementasi ePurchasing Berdasarkan PERPRES No.46 Tahun 2025 & Kep,Ka LKPP No.177 Tahun 20242. Praktek Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan (Spesifikasi Teknis, HPS & Rancangan Kontrak Melalui ePurchasing)3. Praktek Penyusunan Dokumen Persiapan Pemilihan (Reviu dokumen Persiapan Pengadaan & Dokumen Referensi Harga) melalui ePurchasing Berdasarkan MCP KPK4. Praktek Transaksi ePurchasing (Metode Negosiasi & Mini Kompetisi Melalui ePurchasing)5. Praktek Penyusunan Kertas Kerja Negosiasi & Mini Kompetisi Melalui ePurchasing)6. Preferensi Harga & HEA Pada ePurchasing Melalui Metode Mini Kompetisi	<p>Cak Mustafa</p>	<p>1 Hari</p> <p>08.00 – 16.00 Wib</p>

C. HASIL PELAKSANAAN SOSIALISASI



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Onje nomor 1B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891252 Fax. : (0281) 891271
PURBALINGGA - 53311

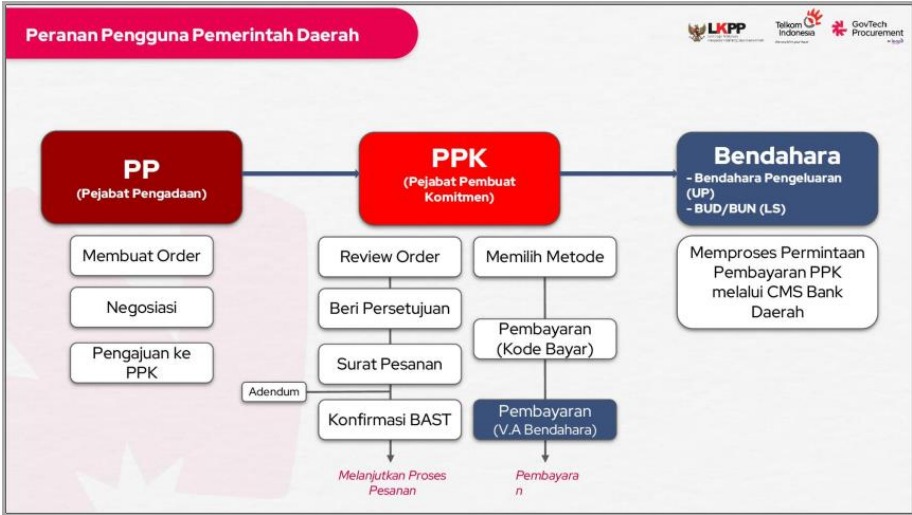
NOTULENSI KEGIATAN

- Kegiatan : Bimtek Online Implementasi E-Purchasing Metode Negosiasi & Mini Kompetisi sesuai Perpres No. 46 Tahun 2025 & SE LKPP No. 1 Tahun 2025
- Hari/Tanggal : Senin, 28 Juli 2025
- Waktu : 08.00 – selesai
- Narasumber : Cak Mustafa (Master Trainer – Procurement Specialist)
- Tempat : Zoom Meeting
(<https://us02web.zoom.us/j/2783465879?pwd=TmbbzfOKW48ng8vB B0DPvQx5A0W5ti.1&omn=81582060085>)
Meeting ID: 278 346 5879
Passcode: PPLC2025
- Peserta : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK) / Pejabat Pengadaan (PP) / Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) (52 OPD)
- Hasil Kegiatan : ☐ Bimbingan Teknis Implementasi E-Purchasing Metode Negosiasi & Mini Kompetisi sesuai Perpres No. 46 Tahun 2025 & SE LKPP No. 1 Tahun 2025 dengan Narasumber Cak Mustofa (Master Trainer – Procurement Specialist) dengan materi:
1. Kebijakan Pelaksanaan E-Purchasing melalui Katalog Elektronik V6 sesuai Perpres No. 46 Tahun 2025 & SE LKPP No. 1 Tahun 2025;
 2. Implementasi dan Praktik Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, Spesifikasi Teknis & Rancangan Kontrak (Surat Pesanan, SSUK & SSKK);
 3. Implementasi dan Praktik Penyusunan Dokumen Persiapan Pemilihan pada E-Purchasing: Penyusunan Dokumen Referensi Harga;
 4. Praktik Transaksi E-Purchasing melalui Katalog Elektronik V6 dengan Metode Negosiasi sampai dengan Pembayaran;
 5. Praktik Transaksi E-Purchasing melalui Katalog Elektronik V6 dengan Metode Mini Kompetisi;
 6. Praktik Penyusunan Kertas Kerja Metode Negosiasi & Mini Kompetisi;
 7. Mitigasi Risiko Metode Pemilihan E-Purchasing melalui Katalog Elektronik V6 & E-Audit pada Katalog Elektronik V6.
- ☐ Dasar Hukum E-Purchasing:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 & Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam PBJP;
 3. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJP melalui Penyedia;
 4. Keputusan Kepala LKPP No. 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
 5. SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Melalui E-Purchasing;
 6. Keputusan Kepala LKPP No. 294 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 7. SE Kepala LKPP No. 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6;
 8. <https://bantuan.inaproc.id> (syarat & ketentuan yang berlaku di Katalog Elektronik Versi 6).
- ☐ E-Purchasing (Pasal 1 Angka 35 Perpres 12 Tahun 2021) adalah tata cara pembelian/memperoleh barang/jasa melalui sistem katalog elektronik;
 - ☐ Katalog Elektronik (Pasal 72 Ayat 1 Perpres 46 Tahun 2025) merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang/jasa, harga, penyedia atau pelaksana swakelola, dan/atau informasi lainnya;
 - ☐ Ketentuan E-Purchasing (Pasal 5 Perpres No. 46 Tahun 2025) pelaksanaan E-Purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan;
 - ☐ Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-Purchasing sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5), dalam hal:
 - a. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi dan/atau layanan; atau
 - b. Berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-Purchasing.
 - ☐ Jenis Pekerjaan di Katalog Elektronik:
 1. Pengadaan Barang;
 2. Pekerjaan Konstruksi;
 3. Jasa Lainnya;
 4. Jasa Konsultansi.
 - ☐ Pelaku Pengadaan E-Purchasing:
 1. Pengguna Anggaran: menetapkan pemenang E-Purchasing untuk paket pengadaan B/PK/JL dengan nilai pagu anggaran paling sedikit 100 M;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen: melaksanakan E-Purchasing diatas 200 juta;
 3. Pejabat Pengadaan: melaksanakan E-Purchasing s/d 200 juta;
 4. Pokja Pemilihan: melaksanakan E-Purchasing metode mini kompetisi;

5. Penyedia: menyediakan barang/jasa pada katalog elektronik berdasarkan surat pesanan.
- ❑ Surat pesanan: bentuk kontrak untuk PBJ melalui E-Purchasing;
 - ❑ Jenis metode E-Purchasing:
 1. Negosiasi harga: dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi atau ketersediaan produk;
 2. Mini kompetisi: dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih penyedia e-cat yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik;
 3. Competitive Catalogue: memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia e-cat dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompertisikan melalui sistem.
 - ❑ Ketentuan Perpres No. 46 Tahun 2025 Pasal 13, Pokja Pemilihan melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali pengadaan langsung dan E-Purchasing dengan pembelian langsung, E-Purchasing dengan mini kompetisi yang melaksanakan adalah pokja pemilihan;
 - ❑ Harga satuan produk yang tercantum pada Katalog Elektronik bukan merupakan harga final, harga tersebut merupakan satuan tertinggi yang dilakukan pembelian oleh PPK/PP kecuali jika harga satuan produk tersebut berupa harga tetap (fix price);
 - ❑ Tahap Persiapan E-Purchasing Katalog:
 1. pemilihan produk;
 2. referensi harga;
 3. dokumentasi.
 - ❑ Tahap Pelaksanaan E-Purchasing Katalog:
 1. Klarifikasi teknis;
 2. Pilih opsi pengiriman;
 3. Negosiasi harga;
 4. Surat pesanan (SP);
 5. Pengiriman;
 6. Serah terima pekerjaan;
 7. Penilaian kinerja penyedia;
 8. Pembayaran.
 - ❑ Pemilihan produk di Katalog Elektronik:
 1. Kesesuaian spesifikasi;
 2. Prioritas penggunaan produksi dalam negeri;
 3. Prioritas produk usaha kecil-koperasi;
 4. Harga terbaik.
 - ❑ Dokumentasi Persiapan E-Purchasing mengacu kepada Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

- ❑ Seluruh tahapan pemilihan produk dan penyusunan referensi harga didokumentasikan oleh PPK/PP;
- ❑ Pedoman Negosiasi Harga:
 1. SE Deputi II LKPP tentang Panduan Penyelenggaraan E-Purchasing Katalog melalui Negosiasi Bagi PPK & PP;
 2. Keputusan Kepala LKPP No. 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
 3. Keputusan Kepala LKPP No. 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
- ❑ Apabila diperlukan PPK dapat meminta jaminan pelaksanaan kepada penyedia katalog elektronik;
- ❑ Rencana permintaan jaminan pelaksanaan tersebut harus diinformasikan pada kolom catatan saat melakukan pelaksanaan E-Purchasing Katalog;
- ❑ Ruang Lingkup Perubahan Surat Pesanan:
 1. Menambah atau mengurangi volume;
 2. Mengubah jadwal waktu permintaan tiba;
 3. Penambahan dan/atau pengurangan harga pengiriman kurir penyedia;
 4. Pergantian ketentuan tambahan surat pesanan tanpa ada perubahan harga pada surat pesanan;
 5. Pergantian persentase (%) PPN dan PPnBM dari produk dan layanan tambahan;
 6. Penambahan dan/atau pengurangan layanan tambahan; dan/atau
 7. Pergantian penanggung jawab penandatanganan dalam surat pesanan.
- ❑ Pembatalan Surat Pesanan:
 1. Penghentian surat pesanan: dapat dihentikan apabila terjadi keadaan kahar;
 2. Pemutusan surat pesanan: tindakan yang dilakukan oleh PPK atau penyedia katalog elektronik untuk mengakhiri berlakunya surat pesanan karena alasan tertentu.
- ❑ Penilaian Kinerja Penyedia Katalog Elektronik dilakukan oleh PPK dengan memberikan nilai dan ulasan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia katalog elektronik selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan ditandatangani BAST;
- ❑ Penilaian kinerja penyedia dapat dilakukan apabila fitur sudah tersedia pada aplikasi katalog elektronik;
- ❑ Pembayaran pada katalog elektronik dilakukan melalui mekanisme:
 1. Pembayaran Langsung (LS);
 2. Pembayaran Uang Persediaan (UP).



❑ Materi Bimbingan Teknis Online dapat diunduh di laman https://bit.ly/materi_v6_purbalingga_cakmustofa;

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan tema “Implementasi E-Purchasing Metode Negosiasi & Mini Kompetisi Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025.” LKPP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, maka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara transparan dan akuntabel melalui Katalog Elektronik Versi 6 LKPP sehingga mewujudkan prinsip-prinsip pengadaan sehingga tercapai tujuan pengadaan *value for money*. Kami mengharapkan Bimbingan Teknis ini merupakan bagian dari upaya peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan belanja pemerintah. Tentunya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih transparan dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan belanja negara yang lebih baik.

LAMPIRAN I Salinan Daftar Hadir

No	Nama Lengkap (dilengkapi gelar)	Nama OPD atau BLUD	Jabatan
1	Tanti Widiyastuti, A.Md.Kg	RSUD PANTI NUGROHO	PP
2	Ardiyanti	RSUD PANTI NUGROHO PURBALINGGA	Pejabat pengadaan
3	Muhamad Sururudin, S.E.	Kantor Kecamatan Bukateja	Fasilitator Pemerintahan
4	Kristina Sutini S.Sos	RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga	Pejabat Pengadaan
5	Firman Yanuar	Dinas Lingkungan Hidup	Admin SPSE
6	Nadia Olivia Anggraini,S.T	Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	Pejabat Pengadaan
7	MARCEL LANTERA, S.T.	Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	Pejabat Pengadaan
8	Muhammad Riski Saputra, ST	Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	JFPPBJ
9	drg. Medi Septario	Puskesmas Bukateja	PLT Kepala Puskesmas
10	Siti Khudriyati, S.Sos.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Bendahara Pengeluaran Pembantu
11	NUR NUZULIANI WIDITA, S.T.	Sekretariat Daerah Kab.Purbalingga	Analisis Kebijakan Ahli Muda
12	Maniel Iestari	UPTD Puskesmas Mrebet	Administrasi Keuangan
13	Samsi Atiin Nur Khasanah Dewi, S.Ak.	UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Staff
14	Nursiam Mandono	Kelurahan Purbalingga Wetan	THL
15	SITI LATIFAH, A.Md	Kantor Kelurahan Bojong	Sekretaris Lurah
16	dr. Prawesti Wulandari	Puskesmas Kutasari	Kepala Puskesmas

No	Nama Lengkap (dilengkapi gelar)	Nama OPD atau BLUD	Jabatan
17	Andhika Ramadyan, S.S, S.M	Bakesbangpol Purbalingga	Staf
18	Teguh Triono	RSUD Panti Nugroho Purbalingga	Kasie Pelayanan ({PPTK)
19	Imam Dody Nugroho	Satuan Polisi Pamong Praja	Pejabat Pengadaan
20	Sutarso, S.Kep	Puskesmas Rembang	Pejabat Pengadaan
21	Sumiyati	Puskesmas Kalkajar	PP
22	ARIS SETIAWAN	KECAMATAN KARANGANYAR	STAF
23	VAZRI ISNAENI	UPTD PUSKEMAS REMBANG	OPERATOR SIPD
24	Dwi Waras Widayanti, S.Tr.Kes	Puskesmas Bukateja	PPTK
25	KIKIT HERINA UTAMI, S.S.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PP
26	Ardian Sulistiyo	Kelurahan Penambongan	KPA (Lurah)
27	NOFERA WIDIANTI, S.AP	DINAS PERHUBUNGAN KAB. PURBALINGGA	KASUBBAG PERNCANAAN DAN KEUANGAN
28	TOFIK HIDAYAT, Amd	UPTD Puskesmas Karangreja	Pengelola Keuangan
29	APRILIANI KARTIKA FACHRI A.Md.	DPUPR	Staf
30	Anar Cahyono, S.Kep.,Ners	UPTD Puskesmas Rembang	Bendahara BLUD
31	Vazri Isnaeni, S.E	UPTD Puskesmas Rembang	Operator SIPD
32	subroto yudo negoro, S. Kep ners	Puskesmas karangjambu	Pejabat pengadaan
33	Royyan Satria Ramadhan Supriyono, A. Md	Kecamatan Kutasari	Staff

No	Nama Lengkap (dilengkapi gelar)	Nama OPD atau BLUD	Jabatan
34	TRI PITOYO, ST	DPUPR KAB. PURBALINGGA	PENATA RUANG AHLI MUDA
35	ENDAH SADARWATI, A.Md. Keb	UPTD PUSKESMAS KARANGREJA	KA SUB BAG TU
36	SUGIYARTI, S. Sos	UPTD PUSKESMAS KARANGREJA	BENDAHARA BLUD
37	ARIENO ROGO, S.Kep, Ners	BLUD PUSKESMAS KARANGREJA	BENDAHARA APBD
38	Nanda Pujiono, S.Kom	UPTD Puskesmas Rembang	Admin SPSE / Penelaah Teknis Kebijakan
39	Isdiarto, S.Kep.NS, M.M.	UPTD Puskesmas Rembang	Kepala Puskesmas Rembang
40	Lilin Lestari.S.Farm. Apt	Puskesmas Karangmoncol	Pejabat Pengadaan
41	Purnawan,S.Pd	Kecamatan Karangmoncol	Pelaksana
42	drg nursyarifah widiasih	puskesmas karangtengah	kepala puskesmas
43	Tsamsya Dhian S,S.Farm	Puskesmas Kalimanah	TTK/PPTK
44	Ragil Rakhmawati	Puskesmas Pengadegan	Pejabat Pengadaan
45	SUJI OKTAMI, SH	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN	KASI KESRA
46	Ummu nur yuhanidt	Kecamatan karanganyar	Operator sipd
47	Sarwono,S.IP	Bagian Kesra Setda Purbalingga	Analisis Kebijakan Ahli Muda
48	Samsi Atiin Nur Khasanah Dewi, S.Ak.	UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Staff
49	Galih Budi Kurniawan, SE	DKPP	Bendahara
50	Dwi Waras Widayanti, S.Tr.Kes	Puskesmas Bukateja	PPTK

No	Nama Lengkap (dilengkapi gelar)	Nama OPD atau BLUD	Jabatan
51	Azizah rokhmah	Puskesmas karangmoncol	Bendahara
52	SITI FATIMAH FUAIDAH, S.IP.	BAPPELITBANGDA	PEJABAT PENGADAAN
53	Pandu Setyo W, S.P.W.K.	Bappelitbangda	Pengadministrasi Pengadaan Barang/Jasa
54	Siti Rojanah, S.Tr.Kes	UPTD Puskesmas Kutasari	Bendahara Pengeluaran BLUD
55	Dwy Setyadi	BAKESBANGPOL	Pejabat Pengadaan
56	EVI JULIANTI, S.Sos	KECAMATAN BOJONGSARI	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
57	Joharyanti, S.Sos	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	Pengelola Data
58	Dewi Nina Sari, S.Kom	Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga	ADB Kependudukan

LAMPIRAN II Surat Undangan

1. Surat Undangan Bimtek



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Onje nomor 1B Telp. (0281) 891012-891059-891452 Fax. (0281) 891271
PURBALINGGA - 53311

Purbalingga, 25 Juli 2025

Nomor : 000.3.1/155
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Undangan Bimtek *Online*
Pengadaan Barang/Jasa

Kepada
Yth. Para Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)/Unit
Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)
(sebagaimana terlampir)
di –
Purbalingga

Dalam rangka kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan tema "Implementasi & Praktek *E-Purchasing* pada Katalog V.6", dimohon kepada Saudara untuk hadir atau menugaskan 1 (satu) orang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)/ Pejabat Pengadaan (PP)/ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pengelola PBJ) pada OPD/Unit Kerja OPD Saudara untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari / Tanggal : Senin / 28 Juli 2025
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB.
Link/Tautan : <https://us02web.zoom.us/j/2783465879?pwd=TmbbzfOKW48ng8vBB0DPvQx5A0W5ti.1&omn=81582060085>
zoom meeting

ID Rapat: **278 346 5879**
Kode Sandi: **PPLC2025**

Keterangan : Khusus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan untuk menugaskan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pengadaan (PP)

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI PURBALINGGA
SEKRETARIS DAERAH



HERNI SULASTI, S.H., M.H., C.FrA
Pembina Utama Madya
NIP. 196706101995032002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Plt. Bupati Purbalingga. (Sebagai laporan)

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor : 000.3.1/155
Tanggal : 25 Juli 2025
Hal : Undangan Bimtek *Online* Pengadaan Barang/Jasa

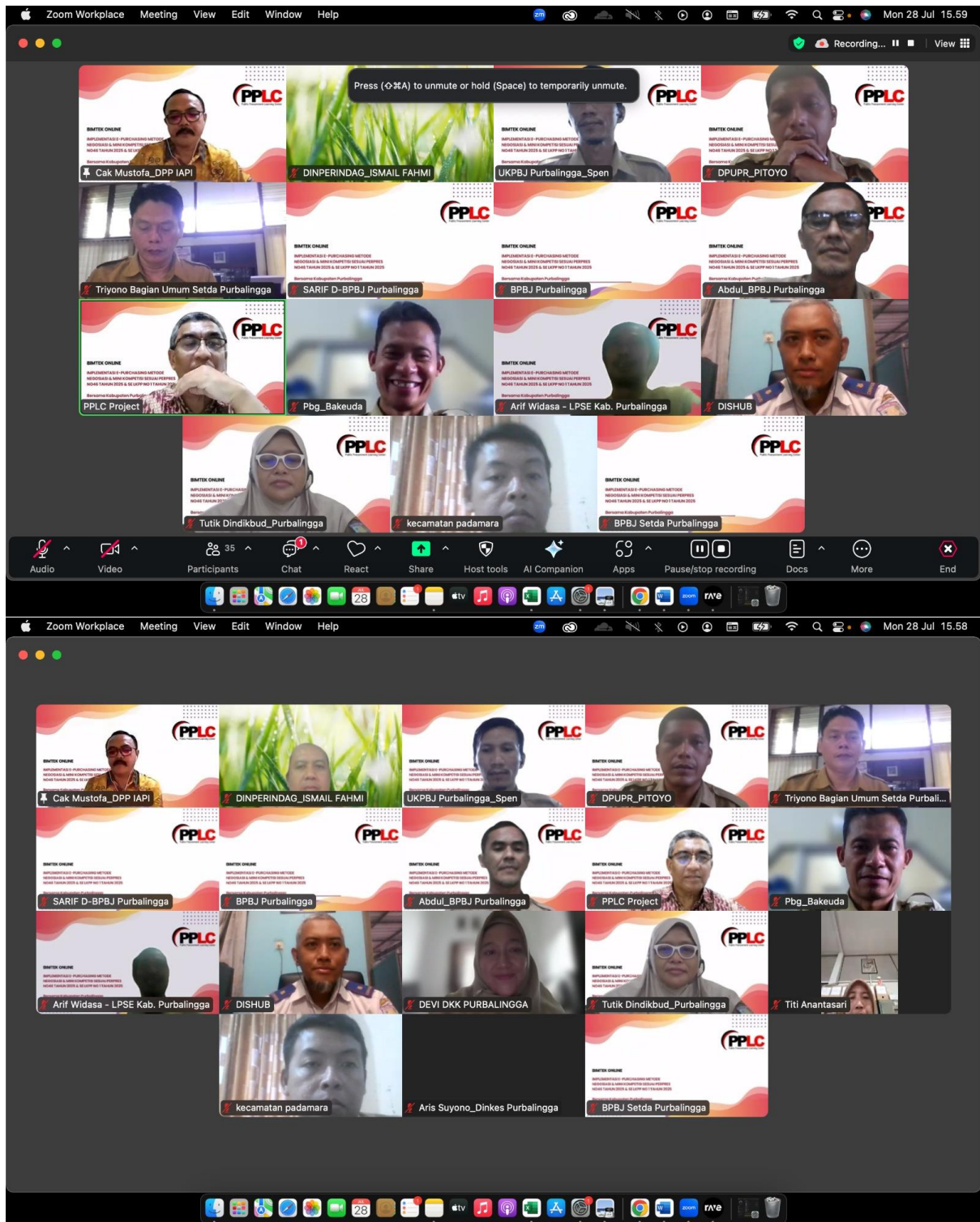
Daftar Undangan

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Badan Keuangan Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Kesehatan;
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Dinas Perhubungan;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Dinas Pertanian;
22. Dinas Perumahan dan Permukiman;
23. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Dinas Tenaga Kerja;
25. Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
28. RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho;
30. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
31. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
32. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
33. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
34. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
35. Kecamatan Bobotsari;
36. Kecamatan Bojongsari;
37. Kecamatan Bukateja;
38. Kecamatan Kaligondang;
39. Kecamatan Kalimanah;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangjambu;
42. Kecamatan Karangmoncol;
43. Kecamatan Karangreja;
44. Kecamatan Kejobong;
45. Kecamatan Kemangkon;
46. Kecamatan Kertanegara;
47. Kecamatan Kutasari;
48. Kecamatan Mrebet;
49. Kecamatan Padamara;
50. Kecamatan Pengadegan;
51. Kecamatan Purbalingga;
52. Kecamatan Rembang.

Keterangan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah menugaskan seluruh Kasubag , JF PPBJ dan staf BPBJ.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN III Dokumentasi Kegiatan



Rekaman *Zoom Meeting* :

https://us02web.zoom.us/rec/share/2b_kOZ-YpmhJqTJX9IShwYCPup3xZ-IWIWhoHQ4T6j9aPBfBcjzxWKfEkRw0z8.iWNsMkGLFRKiBSic

Kode sandi: PPLC2025@